

## **BAB IV**

### **PENYEBAB KEGAGALAN TRANSISI DEMOKRASI**

Bab ini membahas penyebab dari kegagalan dalam upaya mewujudkan proses demokratisasi di Mesir setelah berakhirnya rezim Mubarak yang diturunkan melalui sebuah gerakan revolusi sipil. Didasarkan pada teori yang digunakan oleh penulis sehingga menghasilkan sebuah hipotesa. Bab ini akan membuktikan hipotesa yang diperoleh oleh penulis pada penelitian ini.

#### **A. Tidak Terciptanya Perubahan**

Dalam proses menuju demokrasi, pemerintahan yang melakukan transisi demokrasi perlu melakukan suatu perubahan pada aspek-aspek mendasar pada bidang sosial, politik, ekonomi. Apabila pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan tersebut, maka proses demokratisasi akan menemukan kesulitan. Tujuan diadakan revolusi sosial yang bernama *arab spring* adalah untuk menurunkan rezim yang berkuasa pada saat itu. Dengan begitu akan tercipta suatu perubahan yang lebih baik untuk masyarakat.

Otoritas militer menutup hampir semua media Islam dan oposisi setelah kudeta 2013 dan menekan yang lainnya jika mereka melakukan liputan kritis terhadap pemerintah baru. Akibatnya, media pemerintah dan gerai swasta yang paling bertahan sangat mendukung Sisi dan militer. Penyensoran resmi dan sensor diri tetap meluas pada 2015. *The Association for Freedom of Thought and Expression*, sebuah organisasi hak asasi Mesir, mendokumentasikan 172 pelanggaran kebebasan pers pada paruh pertama tahun ini, termasuk penyensoran dan kekerasan fisik (freedomhouse.org, 2018). Penangkapan wartawan atas tuduhan yang meragukan terus berlanjut, dan pekerja media mengalami kesulitan dalam mengakses atau melaporkan apa yang terjadi di Sinai. Meskipun tiga jurnalis Al-Jazeera yang dijatuhi hukuman pada

tahun 2014 untuk setidaknya tujuh tahun penjara akhirnya dibebaskan atau diampuni pada tahun 2015, *Committee to Protect Journalists* menemukan bahwa 23 wartawan tetap berada di balik jeruji besi pada Desember 2015, membuat Mesir berada di urutan kedua setelah China dalam jumlah wartawan yang ditahan.

Gangguan negara dalam publikasi dan sirkulasi surat kabar terus berlangsung sepanjang tahun. Pada bulan Agustus, *Al-Mesryoon*, *Al-Sabah*, dan *Sawt al-Ummah* dihentikan dari masalah dalam penerbitan atau memiliki masalah sebelum didistribusikan karena keberatan negara terhadap konten dari surat kabar tersebut. Aktivis masyarakat sipil juga mengkritik penerbitan perintah guna mencegah berita dari cakupannya terhadap kasus-kasus hukum yang sensitif.

Sebuah rancangan undang-undang *cybercrime* yang diedarkan pada April 2015 dikecam oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil karena menggunakan bahasa yang tidak jelas yang dapat mengkriminalisasi perbedaan pendapat secara online dengan dalih memerangi pelanggaran yang sah seperti peretasan. Undang-undang akan menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat jika tujuan kejahatan adalah untuk mengganggu ketertiban umum, membahayakan keamanan warga negara, atau membahayakan persatuan nasional dan perdamaian sosial. Undang-undang itu disetujui oleh kabinet pada bulan Mei, tetapi belum disetujui oleh Sisi atau dilaksanakan pada akhir tahun.

Islam adalah agama negara, dan kebanyakan orang Mesir adalah Muslim Sunni. Penganut kepercayaan Kristen Koptik membentuk minoritas substansial, dan ada sejumlah kecil penganut agama Yahudi, Muslim Syiah, atheis, dan Baha'is. Konstitusi 2014 membuat hak atas kebebasan beragama mutlak dan diterima dengan baik oleh minoritas agama, meskipun sedikit yang berubah dalam praktik sejak adopsi dokumen tersebut. Penyalahgunaan terhadap Koptik berlanjut pada tahun 2015, dengan banyak kasus pemindahan paksa,

serangan fisik, serangan bom dan pembakaran, dan pemblokiran konstruksi gereja. Orang-orang Kristen juga ditangkap dengan dakwaan dakwah, dan tuduhan serupa terhadap Syiah menyebabkan penutupan badan amal dan penangkapan seorang aktivis.

Kebebasan akademik telah memburuk sejak kudeta 2013. Meskipun ada larangan terhadap protes politik, universitas telah menjadi pusat demonstrasi anti pemerintah dan target tindakan keras pemerintah. Pada Januari 2015, Sisi mengeluarkan keputusan yang memungkinkan pemecatan profesor universitas yang terlibat dalam kegiatan politik di kampus.

Diskusi pribadi telah menjadi lebih dijaga dalam menghadapi vigilantisme dan peningkatan pemantauan media sosial untuk konten kritis. Media telah meminta kepada masyarakat luas untuk memberi tahu siapa pun yang mereka curigai merongrong negara, dan beberapa penangkapan dilaporkan berasal dari percakapan tak sengaja di tempat umum. Pengguna media sosial telah menghadapi penangkapan atau penuntutan karena dugaan pelanggaran mulai dari penodaan agama hingga memicu protes atau menentang pemerintah secara online.

Kebebasan berkumpul dan berserikat sangat dibatasi. Keputusan November 2013 memberi pihak berwenang peluang besar untuk melarang dan secara paksa membubarkan pertemuan 10 orang atau lebih. Undang-undang itu juga melarang semua protes di tempat-tempat ibadah dan mengharuskan penyelenggara protes untuk memberitahu polisi setidaknya tiga hari sebelumnya. Protes terhadap pemerintah meningkat sepanjang tahun 2015, tetapi sering berakhir dengan bentrokan dengan polisi dan penduduk setempat, dan polisi berulang kali menggunakan kekuatan yang berlebihan. Pada peringatan pemberontakan tahun 2011 pada bulan Januari, pihak berwenang menanggapi demonstrasi Islam dengan gas air mata dan peluru tajam, yang mengakibatkan

setidaknya 23 orang tewas dan 516 orang ditahan, menurut pemerintah.

Undang-undang 2002 tentang Asosiasi memberi pemerintah kekuatan menyapu organisasi non-pemerintah (LSM), termasuk kemampuan untuk menutup kelompok, menyita dana mereka, dan memblokir nominasi ke dewan pemerintahan mereka. Individu yang bekerja dengan kelompok yang tidak terdaftar menghadapi hukuman penjara. Pemerintah di masa lalu mengizinkan LSM untuk beroperasi tanpa registrasi, menegakkan hukum secara selektif. Berdasarkan keputusan tahun 2014, anggota LSM yang menggunakan dana asing untuk melakukan tindakan yang "merugikan kepentingan nasional" menghadapi penjara seumur hidup dan denda sebesar 500.000 pound Mesir (\$ 56.000). Jika pelaku adalah pegawai negeri atau melakukan pelanggaran untuk tujuan terorisme, ia dapat menghadapi hukuman mati. LSM Mesir menghadapi pelecehan dalam bentuk penggerebekan kantor, penangkapan anggota, dan pembatasan perjalanan sepanjang 2015. Ratusan LSM ditutup dan aset mereka disita karena diduga memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin.

Pemogokan memainkan peran penting dalam pemberontakan 2011, dan pekerja membentuk dua federasi serikat independen pada tahun 2011 dan 2013, mengakhiri monopoli lama federasi bersekutu negara. Pemogokan berlanjut di tengah masalah ekonomi yang sedang berlangsung pada tahun 2015, dengan lebih dari 1.100 protes buruh dilaporkan, meskipun ini menandai penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pihak berwenang menanggapi tindakan dengan penggerebekan, penangkapan, dan intimidasi. Pada bulan April, pengadilan tingkat tinggi memutuskan bahwa setiap pegawai pemerintah yang berpartisipasi dalam pemogokan atau duduk-duduk akan dipaksa pensiun; keputusan itu dibatalkan pada bulan Desember.

*The Supreme Judicial Council*, badan pengawas hakim senior, mencalonkan sebagian besar anggota peradilan. Namun, Kementerian Kehakiman memainkan peran kunci dalam penugasan dan transfer, memberikan pengaruh yang tidak semestinya atas pengadilan. Hakim memainkan peran utama dalam penyusunan konstitusi 2014, yang secara signifikan meningkatkan otonomi peradilan, termasuk dengan mengizinkan setiap badan hukum utama untuk menerima anggarannya sebagai satu baris dan memungkinkan SCC untuk menunjuk ketua sendiri.

Sejumlah kasus kriminal pada tahun 2015 menampilkan pelanggaran berat proses hukum dan menunjukkan tingkat politisasi yang tinggi dalam sistem pengadilan, yang biasanya menghasilkan hukuman keras untuk musuh yang dirasakan pemerintah. Setidaknya 538 orang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2015, termasuk hukuman terakhir bagi 183 orang dalam sidang massal yang diduga pendukung Ikhwanul Muslimin yang dituduh membunuh 11 petugas polisi dan dua warga sipil pada tahun 2013. Setidaknya 22 orang dieksekusi selama tahun .

Meskipun konstitusi membatasi pengadilan militer terhadap warga sipil yang secara langsung melibatkan militer, personalnya, atau propertinya, keputusan presiden pada Oktober 2014 menempatkan semua fasilitas publik dan vital di bawah yurisdiksi militer, yang menghasilkan rujukan ribuan terdakwa sipil ke militer. pengadilan. Tudingan yang dibawa ke pengadilan militer seringkali tidak jelas atau palsu, terdakwa tidak diberikan proses hukum, dan standar pembuktian dasar secara rutin diabaikan.

Kebrutalan polisi dan kekebalan atas pelanggaran oleh pasukan keamanan adalah katalis untuk pemberontakan tahun 2011, tetapi tidak ada reformasi yang diberlakukan. Laporan dugaan pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan paksa meningkat tajam pada tahun 2015, dengan perkiraan di antara berbagai LSM mulai dari lusinan hingga beberapa ratus

kasus. Kondisi penjara sangat buruk; narapidana harus disiksa, berdesak-desakan, dan kurangnya sanitasi dan perawatan medis. Perkiraan berdasarkan laporan media menemukan lebih dari 600 kasus penyiksaan dan 137 orang tewas dalam tahanan pada tahun 2015 (freedomhouse.org, 2018). Undang-undang anti terorisme yang sangat kontroversial pada Agustus 2015 memberikan definisi yang tidak jelas untuk terorisme dan memberikan kekebalan bagi aparat penegak hukum saat menjalankan tugasnya.

Mesir berada dalam keadaan darurat dari 1981 hingga Mei 2012, dan selama tiga bulan setelah kudeta 2013. Undang-Undang Darurat memberi kekuasaan luas bagi pemerintah untuk pengawasan dan penahanan. Keadaan darurat dan jam malam telah diberlakukan sejak Oktober 2014 di Sinai bagian utara, dengan perpanjangan tiga bulan yang berulang. Sebuah keputusan memperluas langkah-langkah pada Juli 2015 diikuti serangan terkoordinasi oleh afiliasi ISIS di wilayah itu yang menewaskan puluhan tentara.

LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) menghadapi penganiayaan berat, dan kondisinya semakin buruk di bawah rezim Al Sisi. Sementara aktivitas seksual sesama jenis tidak secara eksplisit dilarang, Masyarakat LGBT dituduh prostitusi atau tindakan asusila. Pada Januari 2015, pengadilan membebaskan 26 pria dari tuduhan tindakan asusila setelah mereka ditangkap di pemandian Kairo pada akhir 2014. Penggerebakan dan penangkapan baru dilaporkan selama 2015.

Kebebasan bergerak dan hak milik sangat dipengaruhi oleh upaya kontra pemberontakan pemerintah di Sinai pada 2015. Selain jam malam, pos-pos pemeriksaan, dan pembatasan perjalanan lainnya, militer telah dengan cepat menghancurkan bangunan-bangunan di kota Rafah untuk menciptakan zona penyangga bersama. perbatasan dengan Jalur Gaza, menggusur ribuan keluarga dan menghancurkan lebih dari 3.000 rumah dan bangunan lain pada akhir 2015

(freedomhouse.org, 2018). Pihak berwenang juga memompa air laut ke terowongan penyelundupan di daerah tersebut, meningkatkan masalah kesehatan dan lingkungan.

Rezim Sisi secara berkala menolak masuk ke para sarjana atau aktivis asing, dan menahan para pembangkang atau jurnalis Mesir ketika mereka mengunjungi negara itu dari luar negeri atau berusaha pergi. Di antara kasus-kasus lain pada tahun 2015, para pejabat menolak memperbarui paspor politisi oposisi Ayman Nour, yang meninggalkan Mesir setelah kudeta 2013 dan tinggal di Libanon.

Konstitusi 2014 jelas menegaskan persamaan jenis kelamin, tetapi ini tidak menghasilkan perbaikan praktis bagi perempuan. Berkat kuota, perempuan memenangkan 75 kursi di 596 kursi di tahun 2015, dan 14 lainnya ditunjuk oleh presiden. Beberapa undang-undang dan praktik-praktik tradisional mendiskriminasi perempuan, diskriminasi kerja adalah hal biasa, dan perempuan Muslim dirugikan oleh undang-undang status pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga tersebar luas, dan pemerkosaan suami-istri tidak ilegal. Masalah lain termasuk kawin paksa dan tingkat mutilasi atau pemotongan genital perempuan yang tinggi.

Kekerasan terhadap perempuan telah muncul dengan cara-cara baru sejak 2011, terutama karena perempuan telah berpartisipasi dalam demonstrasi dan menghadapi peningkatan tingkat kekerasan seksual di depan umum. Keputusan tahun 2014 mengkriminalisasi pelecehan seksual, dengan hukuman penjara hingga lima tahun, sebagai bagian dari strategi nasional untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Para kritikus berpendapat bahwa undang-undang itu tidak memadai dan strategi itu gagal, dengan alasan kurangnya perlindungan bagi saksi, berlanjutnya kasus pelecehan seksual kelompok di depan umum, dan pelecehan oleh petugas polisi, yang menghalangi perempuan dari melaporkan kejahatan.

Wanita dan anak-anak Mesir, migran dari sub-Sahara Afrika dan Asia, dan pengungsi Suriah yang semakin rentan terhadap kerja paksa dan perdagangan seks di Mesir. Pihak berwenang Mesir secara rutin menghukum individu karena pelanggaran yang berasal langsung dari keadaan mereka sebagai korban perdagangan.

Kondisi politik di Mesir yang tidak kunjung mengalami perbaikan juga mendapat sorotan. Setelah berakhirnya pemerintahan Mubarak, Mesir mengalami situasi yang tidak kondusif pasca seringnya terjadi kerusuhan saat revolusi 18 hari tersebut. Rezim setelah Mubarak seharusnya dapat memperbaiki keadaan tersebut dengan meningkatkan kondusifitas dalam negeri. Kerap terjadinya konflik dapat mengganggu upaya segenap elemen masyarakat Mesir untuk mewujudkan demokrasi di negaranya.

Sejak 14 Agustus, telah terjadi wabah kekerasan yang signifikan di seluruh Mesir ketika militer bergerak untuk membersihkan kamp-kamp protes yang didirikan untuk mendukung presiden yang baru terpilih dan terpilih secara demokratis, Muhammad Mursi. Namun, stabilitas politik Mesir telah secara signifikan diruntuhkan selama 32 bulan terakhir, sejak Januari dan Februari 2011, ketika unjuk rasa anti-pemerintah di seluruh negara menyebabkan pengunduran diri mantan presiden lama melayani, Hosni Mubarak, dan pelarangan mantan penguasa Partai Demokrasi Nasional (NDP). Setelah periode transisi pemerintahan militer di bawah Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (Februari 2011 hingga Juni 2012), partai-partai politik Islam muncul sebagai kekuatan politik dominan dalam pemilu pada akhir 2011 dan awal 2012. Kebebasan Ikhwanul Muslimin (MB) dan Partai Keadilan (FJP) dan Partai Salafi al-Nour (dan Blok Islam) muncul sebagai kelompok politik utama, dengan sekitar 65 persen kursi di Majelis Rakyat. Partai-partai Liberal, kiri, moderat Islam dan mantan partai yang berafiliasi dengan NDP bernasib buruk. Pemilihan presiden pada pertengahan 2012 dimenangkan oleh Muhammad Mursi, anggota Ikhwanul



Muslimin, dia secara sengit mengalahkan Ahmad Shafiq, mantan menteri kabinet era Mubarak.

Dari Juni 2012 hingga Juni 2013, permusuhan terhadap pemerintah yang didominasi Islam tumbuh sebagai respon terhadap tuduhan oposisi bahwa Islamis memusatkan kekuasaan, merusak fungsi peradilan dan gagal memenuhi tujuan revolusi 2011 (Colling, 2013). Proses penyusunan konstitusi pada akhir 2012 juga dikecam keras oleh oposisi karena komite perancang, Majelis Konstituante, diduga didominasi oleh tokoh-tokoh Islamis. Ketegangan antara oposisi dan Islamis memuncak dalam protes anti-Islamis besar-besaran di seluruh negara pada Juni 2013. Pada 3 Juli, kepemimpinan militer yang kuat mengumumkan bahwa mereka melakukan intervensi dalam krisis. Militer mengumumkan penangguhan konstitusi. Militer juga menyingkirkan dan menangkap Mursi dan menjadikan kepala Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour, presiden sementara. Sejak itu, Mansour telah mengeluarkan deklarasi konstitusional pada 8 Juli yang menjabarkan periode transisi yang diperkirakan akan berlangsung setidaknya enam bulan, menunjuk perdana menteri baru pada 9 Juli, dan mengawasi penunjukan kabinet sementara baru pada 16 Juli.

Dalam minggu-minggu setelah kudeta militer 3 Juli, Koalisi Nasional yang dipimpin Ikwatul Muslimin melakukan sejumlah protes terhadap pengambilalihan militer, menyerukan pemulihan Mursi dan konstitusi sebelumnya. Ini sebagian besar diadakan pada hari Jumat dan mempengaruhi ibukota, Kairo, dan Alexandria. Dari pertengahan hingga akhir Juli, dua titik pengumpulan utama muncul di Kairo dan Giza, yaitu Masjid Rabaa El Adawia di Nasr City dan Nahda Square, masing-masing. Protes ini dipengaruhi oleh tindakan kekerasan sporadis, baik kecil maupun signifikan. Pada 8 Juli, personil militer menembaki demonstran pro-Mursi di Kota Nasr, menewaskan 51 orang. Pada 27 Juli, sekitar 120 demonstran pro-Mursi tewas dalam serangan lain di Kota Nasr (Colling, 2013). Menyusul peristiwa ini, seruan oleh

pemerintah sementara kepada Ikhwanul Muslimin untuk membubarkan kerumunan warga di Kairo dan Giza meningkat dan keprihatinan dikemukakan bahwa pihak berwenang berencana untuk membatalkan aksi besar setelah Ramadhan.

Pada tanggal 14 Agustus, kekhawatiran ini direalisasikan sebagai pasukan polisi, didukung oleh personil militer, mengepung dan menyerbu tempat-tempat protes Islam di Giza dan ibu kota. Penindasan dan protes dan kekerasan reaksioner berikutnya sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 400 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Ikhwanul Muslimin telah menuduh bahwa sekitar 2.000 orang tewas. Tindakan kekerasan, yang berdampak pada pusat-pusat kota antara Aswan dan Alexandria, mengambil bentuk bentrokan bersenjata antara kelompok politik yang berlawanan dengan pasukan keamanan, di samping serangan yang ditargetkan pada instalasi keamanan dan tempat ibadah Kristen Koptik. Warga negara asing dan daerah yang sering dikunjungi oleh warga negara asing tidak terlalu terpengaruh. Namun setidaknya satu wartawan Inggris ditembak dan tewas ketika meliput kerusuhan di Kairo.

Tidak jarang mendengar orang Mesir mengatakan bahwa revolusi gagal, sementara kaum revolusioner dibiarkan tanpa harapan, tanpa kepemimpinan yang terpadu. Transisi politik setelah Revolusi 30 Juni tidak berhasil dalam memberikan orang-orang satu hal yang mereka minta yakni sebuah suara sejak 2011. Transisi demokratis yang sukses menuntut bahwa rakyat memerintah pemerintah dan rakyat mengendalikan ranah publik, bukan sebaliknya (Colonna, 2018).

Tidak ada transformasi atau distribusi kekuatan yang efektif di antara lembaga-lembaga pemerintahan negara di Mesir, dan oleh karena itu tidak ada pemutusan nyata dari otoritarianisme yang sudah mendarah daging di masa lalu. Militer terus mengendalikan negara. Ketiadaan checks and balances yang efektif telah memfasilitasi tindakan keras terhadap kebebasan berbicara dan masyarakat sipil, semuanya

dengan kedok “keamanan nasional.” Hasilnya adalah masyarakat dalam pemberontakan yang tenang terhadap penindasan yang sama yang mengarah pada revolusi 2011 dan *arab spring* yang lebih luas dan data survei mendukung pandangan ini.

Serangan militan Islamis terhadap pasukan keamanan dan warga sipil melonjak di Semenanjung Sinai segera setelah penghapusan elemen Ikhwanul Muslimin dari pemerintah, dan demonstran pro Mursi menghadapi pasukan bersenjata. Asosiasi ditarik antara unsur-unsur tertentu dari Ikhwanul Muslimin dan kelompok militan di Sinai, dan Ikhwanul Muslimin dengan cepat menjadi identik dengan terorisme dalam wacana pemerintah. Ketika oposisi diberi label ancaman terhadap keamanan nasional, jalan di depan sangat licin. Langkah-langkah menindas yang dihasilkan dari penunjukan ini semakin digunakan untuk menekan mereka yang menantang pemerintah. Ribuan tokoh oposisi sekarang diduga duduk di penjara. Sebuah laporan yang dirilis pada bulan September 2016 menegaskan bahwa penjara-penjara Mesir menampung sekitar 60.000 tahanan politik 57% dari populasi yang dipenjara (Colonna, 2018).

Penindasan oposisi telah mengambil alih banyak aspek masyarakat Mesir. Surat kabar yang lantang telah dilarang undang-undang sementara undang-undang anti-protes dan LSM yang kejam telah melumpuhkan ruang publik. Semua kandidat oposisi asli untuk Presiden Abdul Fattah Al-Sisi saat ini telah mengundurkan diri dari pemilihan presiden yang akan datang, dan pendukung mereka tidak dapat berbicara, karena takut akan pembalasan. Menghancurkan oposisi dan melarang perbedaan politik yang sebenarnya atas nama stabilitas, dapat menyebabkan sebaliknya. Sebagian sebagai tanggapan terhadap aturan otoriter Sisi, pemberontakan di Sinai utara tak henti-hentinya dan Mesir telah menjadi medan perang penting dalam perjuangan melawan ISIS dan afiliasinya. Selain itu, tindakan represif mengancam untuk memprovokasi ketidakpuasan publik.

Dibidang ekonomi, tampaknya pemerintah belum menemukan solusi jitu untuk memperbaiki perekonomian di negara Mesir. Tingginya tingkat inflasi dari tahun 2011 hingga 2016 telah menghambat Mesir dalam proses transisi demokrasi. Revolusi untuk menuntut turunnya Hosni Mubarak telah membelenggu negara tersebut dari perkembangan berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Kerusakan yang kerap terjadi mengakibatkan pusat-pusat perekonomian masyarakat ditutup. Dengan pengunduran diri Mubarak dari kursi kepresidenan telah menimbulkan semangat baru bagi rakyat Mesir. Untuk keluar dari masa-masa sulit pasca kegaduhan era revolusi, Mesir memerlukan pemimpin yang dapat segera berbenah diri. Sektor ekonomi merupakan sektor yang sangat penting bagi suatu negara untuk menjaga kondusifitas dalam negerinya. Apalagi di masa-masa transisi.

Sejak revolusi Januari 2011, Mesir telah dicengkeram oleh pendalaman stagflasi: pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan terakhir tahun 2012 hanya 2,2 persen menurut data resmi, sementara inflasi naik pada Februari 2013 ke tingkat tahunan 8,7 persen, tingkat tertinggi sejak 2010. Kombinasi ini telah menempatkan tekanan yang memuncak pada rakyat Mesir biasa, yang menghadapi kenaikan harga untuk barang-barang pokok (misalnya makanan, obat-obatan) dan meningkatnya pengangguran, yang naik menjadi 13 persen pada kuartal terakhir 2012, naik dari 9,8 persen selama periode yang sama periode 2010 yang diterjemahkan menjadi 850.000 orang yang menganggur bertambah (Singh, 2018).

Masalah-masalah ini sebagian besar didorong oleh dua faktor. Pertama dan terutama adalah ketidakstabilan politik, yang telah mendorong pelarian modal dan merugikan bisnis domestik. Kedua adalah kurangnya fleksibilitas dalam kebijakan fiskal dan moneter Kairo, khususnya defisit anggarannya yang meningkat (akibat dari makanan besar dan subsidi bahan bakar) dan upaya untuk mempertahankan pound Mesir terhadap devaluasi.

Ketidakstabilan politik yang mengikuti revolusi, yang belum mereda, mendorong arus investasi asing langsung dan investasi portofolio secara besar-besaran; menurut Bank Sentral Mesir, kerugian ini mencapai \$ 418,1 juta dan \$ 3,3 miliar, masing-masing, pada paruh kedua tahun 2011. Hal ini pada gilirannya mendorong Mesir untuk mengubah deposito mereka menjadi dolar dan memindahkan uang ke luar negeri, memperburuk tekanan pada pound.

Arus keluar modal telah diikuti oleh penurunan tajam dalam pariwisata, sumber valuta asing penting lainnya. Kementerian Pariwisata Mesir telah melaporkan kerugian sebesar \$ 2,5 miliar dalam pendapatan pariwisata sejak Januari 2011 dibandingkan dengan tingkat pra-revolusi umum, dan Forum Ekonomi Dunia baru-baru ini - dan menghancurkan - peringkat negara sebagai salah satu tujuan paling berbahaya di dunia untuk turis. Perkembangan ini menurunkan permintaan pound, nilai yang telah menurun dari sekitar 5,8 terhadap dolar pada tahun 2010 ke rekor terendah 6,78 hari ini (dilaporkan 7,3 pada pasar gelap).

Karena ingin menghindari kenaikan harga impor kunci dengan harga dalam dolar, Bank Sentral bergerak untuk mempertahankan nilai pound, menghasilkan penurunan mengejutkan dalam cadangan devisa Mesir dari hampir \$ 37 miliar sebelum revolusi menjadi sekitar \$ 13,5 miliar hari ini. Lebih jauh lagi, sekitar setengah dari cadangan ini dalam bentuk emas, yang pada dasarnya tidak likuid karena disimpan di Mesir. Ini berarti bahwa cadangan yang tersedia cukup untuk menutupi impor lebih dari satu bulan, yang sangat penting mengingat kebutuhan Mesir untuk membeli bahan bakar dan gandum di pasar global dan melayani utang luar negerinya.

Sementara itu, defisit anggaran pemerintah pasca-revolusi dan utang telah meningkat pada tingkat yang semakin cepat karena nilai pound yang semakin berkurang dan harga komoditas global yang tinggi mendorong tagihan subsidi

Kairo yang menyumbang setidaknya 27 persen dari seluruh pengeluaran pemerintah. Hal ini disertai dengan peningkatan pengeluaran untuk manfaat sosial, permintaan utama revolusi. Secara keseluruhan, belanja tunjangan sosial dan subsidi naik 49 persen dari Juli 2012 hingga Januari 2013 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, defisit anggaran naik 36 persen menjadi \$ 177 miliar periode itu dan diproyeksikan meningkat menjadi \$ 27-34 miliar pada bulan Juli. Dengan peringkat kredit internasional Mesir yang berulang kali diturunkan peringkatnya, pemerintah telah dipaksa untuk membiayai defisit besar ini dengan mengandalkan hampir secara eksklusif pada utang domestik, yang tahun lalu naik \$ 34 miliar untuk mencapai \$ 184 miliar, atau hampir 70 persen dari produk domestik bruto (Signh, 2018). Hal ini telah meningkatkan biaya pinjaman dalam negeri, berpotensi menghimpun pinjaman sektor swasta yang vital bagi pertumbuhan ekonomi yang diperbarui.

Secara bersama-sama, perkembangan ini melukiskan gambaran yang mengerikan bagi orang Mesir, terutama jika pemerintah kekurangan valuta asing yang diperlukan untuk impor bahan makanan dan bahan bakar, yang mengakibatkan kekurangan. Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri Mesir, produk makanan mewakili sekitar 17 persen impor negara itu, dan produk minyak sekitar 18 persen. Dari 2011 hingga 2012, impor ini meningkat setidaknya 10 dan 28 persen, masing-masing. Pasokan gandum Mesir dilaporkan sudah di bawah tekanan, berkurang dari enam bulan menjadi tiga. Alternatifnya - mengakhiri pertahanan Bank Sentral terhadap pound - bisa berarti penurunan tajam nilai mata uang, inflasi yang signifikan, dan bahkan lebih banyak tekanan pada anggaran dan bank-bank. Dalam kata lain, Mesir menghadapi kemungkinan kesulitan ekonomi yang signifikan dan kerusakan sosial lebih lanjut.

Di pinggiran kota kelas menengah Rehab New Cairo, Ahmed Disouki, pemilik dua restoran lokal dan falafel, mengeluh bahwa selain mengelola restorannya, ia sekarang

harus menyulap pekerjaan paruh waktu lain untuk bertahan hidup. "Orang-orang seperti saya yang berurusan dengan produk akhir yang dijual kepada konsumen paling merasakan inflasi," kata Disouki (Shukrallah, 2016). "Saya tidak dapat menaikkan harga banyak karena saya tidak ingin kehilangan pelanggan, tetapi biaya terus meningkat dan orang-orang membeli lebih sedikit." Disouki, di awal empat puluhan dan seorang ayah dari satu anak, mengatakan dia harus mengambil pekerjaan lain sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta setelah restorannya berhenti menghasilkan keuntungan. "Saya memiliki sekitar 100 pekerja, yang semuanya kehilangan mata pencaharian jika saya tutup, tetapi begitu saya mulai melihat kerugian, saya harus melakukannya," kata Disouki.

Tingkat inflasi telah mencapai tingkat tertinggi dalam beberapa tahun, dengan inflasi inti mencapai 13,94 persen pada bulan September. Kelas menengah Mesir, tidak hanya yang miskin, tampaknya merasakan dampaknya. Para ekonom mengatakan tingkat inflasi akan terus meningkat, dengan devaluasi pound dan putaran pemotongan subsidi dalam pipa, kedua elemen inti dalam reformasi yang direncanakan pemerintah. Bank Sentral Mesir mendepresiasi nilai pound Mesir Maret lalu sebesar 14 persen dan diperkirakan mendevaluasinya dengan tambahan 30-40 persen karena Mesir mencoba menyelesaikan kesepakatan pinjaman dengan IMF senilai \$ 12 miliar. Pemerintah berpendapat ini akan meningkatkan kepercayaan internasional dalam ekonomi Mesir yang sedang sakit. Menurut Disouki, seorang pekerja terampil di restorannya yang biasanya dibayar sekitar 1.000 EGP per bulan sekarang tidak akan menerima kurang dari EGP 3.000.

“Kebanyakan orang yang bekerja di pekerjaan padat karya seperti itu, berdiri berjam-jam di depan api, adalah perokok berat dan sebungkus Cleopatra (merek rokok lokal) sekarang harganya EGP 10 selain transportasinya, seorang pekerja akan membutuhkan EGP 1.000 hanya untuk menutupi

pengeluarannya sendiri di tempat kerja” (Shukrallah, 2016). Biaya tagihan listrik restoran saja sudah naik dari EGP 7.000-8.000 per bulan tahun lalu ke EGP 15.000-18.000. Bahan dasar memasak seperti minyak, kacang, gula dan tepung semuanya menjadi lebih mahal, Disouki menjelaskan. Disouki juga mengatakan bahwa para pedagang, dalam mengantisipasi kenaikan harga, tidak lagi menyediakan restorannya dengan produk dalam jumlah besar dan sering tidak memiliki persediaan produk yang dibutuhkan karena kekurangan impor.

Di sebuah negara yang mengimpor \$ 60 miliar dalam produk dan mengekspor hanya \$ 20 miliar, kekurangan dolar akan berarti kekurangan pasokan, kata managing director di Grup Multiples Omar El-Shenety, menambahkan bahwa inflasi tidak disebabkan oleh devaluasi saja (Shukrallah, 2016). Menurut El-Shenety, inflasi kemungkinan akan mencapai 20 persen pada kuartal ketiga dan akan terus tinggi untuk sementara waktu. Sementara devaluasi adalah alasan utama meningkatnya tingkat inflasi, kelangkaan produk karena kekurangan dolar juga berkontribusi pada kenaikan harga. Penghapusan subsidi dan kenaikan harga layanan publik merupakan penyebab utama lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai yang baru (PPN) akan memiliki efek “*spill over*”, El-Shenety mengatakan, untuk tercermin dalam harga dari banyak produk. Fakta bahwa bank sentral Mesir telah mencetak uang untuk menutupi defisit selama beberapa tahun akan memiliki efek yang tertinggal yang akan terus mencerminkan tingkat inflasi untuk satu atau dua tahun lagi, ekonom yang berbasis di Kairo mengharapkan pemerintah akan terus secara bertahap mendevaluasi pound. El-Shenety memprediksi bahwa ini akan dilakukan lebih dari tiga tahap, dengan setiap tahapan pinjaman IMF yang diharapkan. "Sulit untuk memastikan strategi bank sentral, tetapi mungkin akan berhasil mengambang dari pound Mesir dan bukan pelampung gratis, sampai kesenjangan antara pasar resmi dan pasar gelap diminimalkan" (Shukrallah, 2016). "Sebuah float gratis tidak disarankan pada tahap saat ini



karena Mesir menderita dari cadangan rendah dan permintaan untuk dolar tidak elastis, kenaikan harga dolar akan terlalu tinggi."

Kampanye pemerintah yang mendorong masyarakat untuk menanggung dampak buruk dari rencana reformasi ekonomi, terdapat papan iklan yang berada di jembatan Kairo dan di sekitar jalan-jalan utamanya yaitu "reformasi yang berani akan membuat jalan menjadi lebih pendek," dan "kami dapat mengonsumsi ransum, mengurangi impor kami". Pemerintah dan tentara telah meluncurkan kampanye yang menawarkan produk dengan harga diskon dan menyediakan komoditas yang kekurangan. Namun, El-Shenety percaya bahwa "kelas menengah tidak akan mendapat manfaat dari atau mengambil keuntungan dari kampanye semacam itu." Sementara jaringan keselamatan sosial yang dibuat oleh pemerintah mungkin membantu situasi ini, kata El-Shenety, mereka tidak akan membantu mengurangi dampak inflasi pada kelas menengah yang rentan.

### **A.1. Kondusifitas Bagi Masyarakat Tidak Terwujud**

Narasi mendasar dari rezim yang dipimpin oleh Abdel Fattah el-Sisi di Mesir adalah bahwa pemerintahan Mohamed Mursi harus dihentikan karena negara itu didera oleh sejumlah protes yang memecahkan rekor. Dengan jutaan orang membanjiri jalan-jalan dan menuntut agar ia melepaskan kekuasaan, militer hanya menanggapi kehendak rakyat dengan tidak menggelar perebutan kekuasaan. Sementara beberapa pengamat percaya dengan sumber militer anonim yang mengklaim bahwa hingga 33 juta orang berada di jalanan, banyak yang masih akan setuju bahwa Mursi menghadapi protes jalanan yang luar biasa tingginya selama tahun berkuasa.

Data menunjukkan rata-rata jumlah protes per hari hampir tiga kali lipat setelah Mursi digulingkan. Lima bulan setelah kudeta terhadap Mursi tercatat pada tingkat protes tertinggi (107,5 per hari) sejak pemberontakan 2011 yang menyebabkan

jatuhnya rezim Mubarak (Holmes & Baoumi, 2016). Sebaliknya, selama tahun Mursi berkuasa, rata-rata ada 38,6 protes per hari. Baru setelah Presiden Adly Mansour mengesahkan undang-undang unjuk rasa pada 24 November 2013, aktivitas protes itu sangat menurun, menyebabkan penurunan 52 persen dalam total protes. Gamal Eid, Direktur Eksekutif *Jaringan Arabic Network for Human Rights Information*, menggambarkan hukum itu lebih kejam daripada undang-undang unjuk rasa tahun 1914 yang diganti, yang disahkan oleh perwira kolonial ketika Mesir masih menjadi pelindung Kerajaan Inggris (Holmes & Baoumi, 2016).

Dari awal protes besar anti-Mursi pada 30 Juni 2013 hingga 31 Desember 2015, *the Global Database of Events, Language, and Tone* (GDELT) mencatat 54.677 protes di Mesir. Data berbicara tentang keefektifan sensor dan represi media. Dalam beberapa menit setelah menyingkirkan Mursi, rezim Al Sisi menutup saluran televisi Islamis dan yang berafiliasi Ikhwanul Muslimin. Komedian Bassem Youssef, program Al Bernameg dan Reem Maged, Baladna Bel Masry, keduanya kritis terhadap rezim, juga kemudian ditutup oleh pemerintah. Sementara sensor media yang terang-terangan seperti itu dapat mencabut sumber informasi alternatif orang Mesir tidak efektif di era data besar. Karena GDELT memperoleh informasinya dari sumber media di seluruh dunia, banyaknya laporan media luar dapat mengimbangi penyensoran di Mesir (Holmes & Baoumi, 2016). Mungkin ada lebih sedikit media di Mesir yang melaporkan tentang protes, tetapi justru sensor ini dapat menyebabkan lebih banyak sorotan media dan pelaporan protes dari luar Mesir.

Rezim Al Sisi menggunakan aksi masa yang turun ke jalan secara kolektif untuk melegitimasi pemecatan Mursi tetapi kemudian segera bergerak untuk membungkam tindakan kolektif seperti itu dalam tindakan keras yang kejam. Ini termasuk membunuh lebih dari 1.000 warga sipil pada satu hari di Rabaa dan dengan demikian melakukan pembantaian terbesar dalam sejarah Mesir pasca-kolonial, mendeklarasikan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, mengeluarkan

hukuman mati massal, dan mengesahkan undang-undang protes kejam yang baru. Gelombang penindasan berlanjut hari ini. Dari Agustus hingga November 2015, sekitar 340 orang telah hilang. Sebelum peringatan lima tahun revolusi Mesir, lebih dari 5.000 rumah di pusat kota Kairo menjadi sasaran penggerebekan (Holmes & Baoumi, 2016).

Tindakan pemerintah ini telah membuat banyak pengamat percaya bahwa pemberontakan massa lain tidak mungkin, dengan alasan bahwa ancaman terbesar bagi Al Sisi bukan berasal dari protes tetapi dari dalam rezimnya sendiri. Namun, dengan mengambil pandangan yang lebih panjang yang bergerak di luar beberapa tanggal simbolis, data menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan protes sejak Februari 2014 tidak menunjukkan tanda mereda. Tampaknya tidak ada penindasan maupun sensor media yang telah mengakhiri protes di Mesir - atau membawa stabilitas Sisi yang dijanjikan. Demonstrasi di bawah Sisi belum sebesar pada 30 Juni 2013. Sebaliknya, fitur yang membedakan protes di Sisi adalah keras kepala mereka, kualitas tak kenal lelah. Dan banyaknya demonstrasi yang telah terjadi sejak pemilihan Sisi masih sangat tinggi: kira-kira lima kali tingkat itu selama tahun-tahun terakhir Mubarak. Meskipun terjadi penindasan dan sensor media yang belum pernah terjadi sebelumnya, Sisi telah menghadapi gelombang protes yang terus-menerus. Bagi Mesir, data yang besar dapat memberi tahu kita lebih banyak daripada kekosongan dari persegi yang pernah diduduki.

#### **B. Warisan Rezim Otoritarian**

sepeninggal dari pemerintahan yang otoriter, rezim tersebut akan mewariskan sejumlah kasus-kasus seperti pelanggaran HAM serta praktek KKN yang dilakukannya ketika menjadi penguasa. Ketika pemerintahan pasca rezim otoritarian tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat pemerintahan rezim yang otoriter atau malah memperparah permasalahan yang ada, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang memimpin akan menurun. Tidak adanya upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang

terjadi dimasa rezim otoritarian akan menghambat proses demokratisasi di suatu negara. Negara yang demokratis merupakan negara yang menghormati segala hak-hak yang dimiliki oleh individu. Suatu individu berhak mendapat keamanan tanpa intimidasi dari pihak manapun oleh karena itu negara berkewajiban memenuhinya. Sebagai negara yang menginginkan terciptanya demokrasi,

Negara Mesir seharusnya terbebas dari unsur-unsur praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktek KKN ibarat parasit dari sebuah negara yang seharusnya dibasmi karena melenceng dari tujuan demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kepentingan pribadi tidak boleh diutamakan apabila proses dari demokratisasi ingin berjalan dengan lancar. Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan jabatan serta kekuasaan untuk kepentingan individu atau golongan harus ditindak oleh negara.

### **B.1. Praktik KKN**

Militer telah memiliki pengaruh luar biasa pada ekonomi Mesir sejak kemerdekaan, dan penanaman kepentingan ekonomi oleh militer meningkat sejak jatuhnya Mubarak. Kementerian Pertahanan secara teratur diberikan kontrak pemerintah oleh sesama kementerian untuk pengembangan jurusan proyek infrastruktur. Kontrak publik besar juga diberikan kepada mitra militer dari negara-negara Teluk (Wickberg, 2015). Mengingat risiko korupsi secara tradisional terkait dengan proyek konstruksi dan kurangnya transparansi dalam kekuatan militer. Militer mengontrol sektor minyak milik negara dan transportasi komersial dan industri yang dimiliki oleh militer dan afiliasi mereka dikenal sebagai sangat menguntungkan dan buram. Keuntungan dari militer adalah "rahasia nasional" dan karena itu tidak terdaftar di pasar saham. Sejak revolusi, militer telah memposisikan sekutunya sebagai aspek penting pada sektor ekonomi dan administrasi

yang memiliki untuk memperluas pengaruh mereka pada kesepakatan pengembangan negara seperti proyek Terusan Suez (Wickberg, 2015).

Meskipun ada undang-undang yang berlaku, kekuasaan parlemen untuk mengawasi sektor pertahanan sering dirusak dan tidak efektif (Government.Defenceindex.org, 2015). Aturan internal Parlemen Mesir, dalam Pasal 36 (6), menyediakan bagi Komite untuk pertahanan, Keamanan Nasional dan Mobilisasi Nasional. Pasal 44 mendefinisikan fungsi-fungsi Komite sebagai mencakup keamanan internal dan eksternal Negara, urusan pertahanan dan angkatan bersenjata, dan undang-undang yang terkait dengannya. Namun, kekuatan parlementernya diremehkan karena berbagai alasan.

Misalnya, kekuasaan komite ditantang oleh pasal 203 Konstitusi, yang menetapkan Dewan Pertahanan Nasional, yang tanggung jawabnya mencakup masalah keamanan nasional dan anggaran angkatan bersenjata. Dipimpin oleh Presiden Republik, Dewan terdiri dari pejabat tinggi departemen pertahanan dan keamanan bersama dengan para eksekutif pemerintah lainnya. Meskipun mandatnya tidak ditentukan dalam Konstitusi, tetapi hal itu membatasi peran presiden dan memperluas peran militer dalam urusan negara sebagai otoritas tertinggi di negara tersebut. Secara bersamaan, anggota Komite Pertahanan, Keamanan Nasional dan Mobilisasi Nasional sering mengeluhkan tentang marjinalisasi legislatif yang disengaja, dan menyerukan keterlibatan legislatif yang lebih besar dalam masalah keamanan dan pertahanan dan perdebatan. Pada saat yang sama, pasal 205 Konstitusi menetapkan Dewan Keamanan Nasional, yang bertanggung jawab untuk mengadopsi strategi keamanan nasional. Selain itu, keresahan publik yang kerap terjadi dan penangguhan Parlemen dan Konstitusi telah mempengaruhi dan mengganggu kegiatan Komite. Akhirnya, independensi komite dipertanyakan karena adanya koneksi dan kepentingan yang mapan antara anggotanya dan para pejabat pertahanan dan keamanan.

Polisi dianggap oleh opini publik sebagai salah satu dari lembaga paling korup di negara ini, dengan 80 persen dari responden kepada *Transparency International*, mengatakan bahwa polisi itu korup atau luar biasa korup (Wickberg, 2015). Hampir 40 persen dari mereka yang ditemui polisi dalam dua belas bulan terakhir kata mereka harus membayar suap. Korupsi kecil meluas dalam kepolisian, dan perusahaan melihat institusi itu sebagai tidak dapat diandalkan dan tidak memihak.

Laporan menunjukkan bahwa, jauh dari menjalani reformasi demokratis, polisi hanya menjadi lebih keras. Penindasannya dan lebih berpengaruh secara politik di bawah aturan militer setelah jatuhnya Mubarak, meskipun fakta bahwa korupsi polisi adalah salah satu yang menentukan faktor *arab spring*. Kekuasaan polisi mendapat sentiment negatif di kalangan penduduk Mesir yang tidak mempercayai internal aparat keamanan mereka setelah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan berulang kali. Seorang mantan perwira polisi yang diwawancarai oleh BBC mengakui, "Polisi akan menggertak orang, menyiksa mereka, dan dengan sengaja mengirim orang yang tidak bersalah penjara (Wickberg, 2015). Polisi telah menewaskan ratusan orang pengunjuk rasa sejak revolusi, tanpa usaha dari pemerintah untuk memperhitungkan kejahatan terhadap pengunjuk rasa. Kementerian Dalam Negeri Mesir telah menolak apapun reformasi, ditandai dengan pengambilan keputusan buram, didominasi oleh jaringan petugas yang beroperasi tanpa transparansi keuangan atau pengawasan politik.

Independensi peradilan selalu merupakan klaim dari hakim negara, banyak yang menganggap bahwa negara membutuhkan lebih banyak akuntabilitas. Konstitusi tahun 2014 adalah langkah ke arah tersebut, memberi masing-masing otoritas peradilan anggaran terpisah dan dengan demikian peningkatan otonomi keuangan. Rasa hormat dan kinerja aturan hukum, bagaimanapun, menurun pada tahun-tahun terakhir, dan sistem pengadilan menjadi sangat dipolitisasi (Wickberg, 2015).

Menurut *Amnesty International*, ratusan Afiliasi Ikhwanul Muslimin dan oposisi lainnya aktivis telah dijatuhi hukuman jangka panjang di penjara atau mati setelah uji coba yang tidak adil menggunakan palsu bukti (Wickberg, 2015). Laporan *Guardian* bahwa pada Maret 2014, seorang hakim mengambil hanya dua sesi pengadilan untuk hukuman mati lebih dari 500 pendukung Morsi atas kematian seorang polisi petugas (Wickberg, 2015). Mantan presiden Morsi baru saja dijatuhi hukuman penjara atas pembunuhan pengunjuk rasa pada tahun 2012, dan terhindar dari hukuman mati, deputy direktur *Amnesty International* untuk Timur Tengah menyatakan bahwa, “Putusan ini menghancurkan ilusi kemerdekaan yang tersisa dan ketidakberpihakan dalam sistem peradilan pidana Mesir (Wickberg, 2015).

## **B.2. Pelanggaran HAM**

Hak asasi manusia merupakan suatu hak fundamental yang harus dihormati oleh siapapun. Siapapun orangnya tanpa memandang kelas, usia, jenis kelamin, pekerjaan, golongan, bangsa, serta apapun itu sudah seharusnya menghargai hak asasi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hak asasi mencakup hak untuk hidup, hak atas kecukupan pangan, hak untuk mendapat tempat perlindungan, hak terhadap sandang, hak terbebas dari polusi udara, hak terbebas dari kebisingan, hak untuk memperoleh air layak minum, hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi dalam aktifitas sosial, ekonomi, dan politik, hak untuk memeluk agama tertentu, hak untuk mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya (Kanmony, 2010).

Pada tanggal 28 Januari 2011, puluhan ribu demonstran turun ke jalan-jalan di Alexandria, Suez, dan Kairo, ibu kota (Hrw.org, World Report 2012: Egypt, 2012). Polisi menanggapi dengan gas air mata, meriam air, peluru karet, dan amunisi hidup dalam upaya mencegah pemrotes maju ke alun-alun pusat kota-kota itu. Kementerian Kesehatan mengatakan 846 orang tewas selama protes pada Januari dan Februari. Sebagian besar dari mereka terbunuh pada 28 dan 29 Januari.

Pada tanggal 2 dan 3 Februari, orang-orang bersenjata berpakaian preman, beberapa menunggang kuda menyerang para demonstran di Lapangan Tahrir, melukai beberapa ratus orang pada dua hari itu setidaknya delapan orang meninggal karena luka tembak.

Militer secara sewenang-wenang menangkap sejumlah wartawan ketika mereka meliput unjuk rasa pada bulan Januari 2011, di samping ratusan pengunjuk rasa yang melakukan aksinya secara damai. Para wartawan dibebaskan dalam beberapa hari setelah penangkapan mereka, tetapi pengadilan militer menghukum banyak pengunjuk rasa kedalam penjara. Sebagai contoh, pihak berwenang mengajukan tuduhan yang meragukan "premanisme" terhadap pengunjuk rasa Amr Beheiry, yang ditangkap selama protes di Lapangan Tahrir pada 26 Februari. Pengadilan militer memvonisnya dengan hukuman lima tahun penjara. Pihak berwenang juga menahan anak-anak, yang menghadapi penganiayaan fisik dan penyiksaan. Anak-anak jalanan sangat rentan terhadap penangkapan dan pelecehan.

Penyiksaan oleh personil militer pertama kali dilaporkan pada 2 Februari, tak lama setelah tentara mengambil alih tugas penegakan hukum dari polisi. Pada tanggal 9 Maret militer membubarkan aksi damai di Tahrir Square, menangkap setidaknya 174 pengunjuk rasa, dan memukul, menendang, mencambuk, dan menerapkan kejutan listrik kepada mereka di pekarangan Museum Mesir di dekatnya. Militer membawa para pengunjuk rasa ini di hadapan pengadilan militer, yang memvonis 134 dari mereka tiga hingga lima tahun penjara dengan dakwaan "premanisme", tetapi membebaskan mereka semua pada Mei setelah dua bulan kampanye publik atas nama mereka.

Militer menggunakan kekuatan yang berlebihan dan melakukan penangkapan massal secara sewenang-wenang di berbagai kota untuk membubarkan demonstrasi dan aksi duduk dalam berbagai kesempatan yaitu pada 25 Februari, 9



Maret, 23 Maret, 16 Mei, 22 Juli, dan 1 Agustus 2011, Militer melakukan tindakan kekerasan dengan memukul dan menikam demonstran yang ditangkap. Pada tanggal 9 April, para perwira militer menggunakan peluru karet dan peluru tajam untuk membasmi pihak-pihak yang bertentangan dengan aturan SCAF, melukai sedikitnya 71 demonstran. Pada tanggal 9 Oktober, selama pembubaran oleh polisi militer dan polisi anti huru hara atas protes masyarakat penganut Kristen Koptik di depan gedung TV negara di Kairo, setidaknya dua kendaraan militer melindas dan menewaskan 13 pemrotes dan 24 lainnya tewas oleh amunisi. Jaksa militer mengawasi penyelidikan atas insiden itu, konflik kepentingan akan memperkuat impunitas militer.

Pasukan keamanan pusat, polisi anti huru hara Mesir, terus menggunakan kekuatan berlebihan ketika mengawasi demonstrasi. Pada 28 dan 29 Juni, polisi anti huru-hara terlibat bentrok dengan para demonstran di luar kementerian dalam negeri selama 16 jam. Polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan dan menggunakan peluru karet dan senjata pelet, melukai 1.114 orang menurut Kementerian Kesehatan. Setelah penurunan Mubarak, polisi terus menggunakan penyiksaan di kantor polisi, pusat penahanan, dan di tempat-tempat penangkapan. Pada bulan Juni sopir bus Mohamed Sabah Nasr meninggal di tahanan di kantor polisi Azbakeya di Kairo setelah polisi menangkapnya bersama tujuh orang lain karena dianggap mengganggu lalu lintas. Mereka yang ditahan dengan Nasr mengatakan bahwa mereka melihat polisi memukulinya (Hrw.org, World Report 2012: Egypt, 2012). Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kematiannya tetapi mereka belum membuat laporan publik.

Insiden kekerasan sektarian berlanjut sepanjang 2011. Pada awal 1 Januari 2011, sebuah bom meledak di sebuah gereja di Alexandria, menewaskan 23 orang. Jaksa membuka penyelidikan tetapi tidak menuduh siapa pun sehubungan dengan serangan pada tulisan ini. Pada tanggal 8 Maret, orang-

orang Kristen di pinggiran timur Kairo, Muqattam, memprotes pembakaran gereja empat hari sebelumnya di Atfih, 13 mil selatan Kairo, dan bentrok dengan umat Islam. Dua belas orang tewas dalam kekerasan dan penembakan berikutnya, dan beberapa rumah dan bisnis Kristen dibakar.

Pada bulan Mei kekerasan sektarian di luar sebuah gereja di Imbaba, lingkungan Kairo, menewaskan 12 orang. Pada tanggal 3 Juli, pengadilan terhadap mereka yang ditangkap sehubungan dengan kekerasan dibuka di depan Pengadilan Keadaan Darurat Keamanan Negara. Pada tanggal 30 September, massa membakar gereja Mar Girgis di Marinab, di Aswan, tetapi pemerintah lokal dan jaksa gagal untuk menyelidiki bukannya menuntut penyelesaian. Perdana menteri memerintahkan percepatan penyusunan undang-undang baru untuk memfasilitasi renovasi dan pembangunan gereja-gereja, permintaan lama umat Kristen, yang menghadapi diskriminasi dalam hal ini.

Pemogokan dan protes buruh meningkat jumlahnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menyebar ke sektor-sektor baru. Pada bulan April 2011 SCAF mengeluarkan UU 34 yang mengkriminalisasi pemogokan yang melibatkan gangguan terhadap pekerjaan lembaga publik atau pekerjaan publik atau swasta (Hrw.org, World Report 2012: Egypt, 2012). Polisi militer menggunakan kekuasaan yang berlebihan pada setidaknya 11 kali untuk membubarkan protes buruh dan duduk-duduk. Pada bulan Juni, polisi militer menangkap lima pekerja yang berdemonstrasi di luar Kementerian Perminyakan dan sebuah pengadilan militer menjatuhkan hukuman satu tahun penjara karena berpartisipasi dalam pemogokan.

Pada tanggal 9 Maret, polisi militer menangkap 20 wanita ketika mereka memutuskan melakukan aksi di Tahrir Square dan kemudian memukuli mereka di pekarangan Museum Mesir di dekatnya. Petugas militer membawa 17 orang dari kelompok itu ke penjara militer dan hari berikutnya

melakukan tes keperawanan pada tujuh perempuan yang mengidentifikasi diri mereka sebagai tidak menikah. Menanggapi kecaman publik, SCAF mengatakan bahwa akan melihat kebenaran masalah ini. Pada bulan Mei 2011, SCAF mengubah UU Hak Politik dengan membatalkan kuota perempuan dari 64 kursi di Majelis Rakyat yang pertama kali digunakan dalam pemilihan parlemen bulan November 2010 dan menggantinya dengan persyaratan bahwa setiap partai harus mencalonkan setidaknya satu kandidat perempuan pada daftar (Hrw.org, 2012). Sebuah formula yang cenderung mengarah pada penurunan tajam dalam jumlah deputi perempuan.

Hukum Status Pribadi Syariah Berbasis Mesir yang mendiskriminasikan perempuan dalam urusan keluarga hanya berlaku untuk Muslim, sementara orang Koptik diatur oleh peraturan gereja yang melarang mereka bercerai kecuali dalam kasus perzinahan. Beberapa penganut Koptik menjadi lebih vokal dalam permintaan mereka akan hukum perdata yang akan memberi mereka hak untuk bercerai.

Terdapat peningkatan penuntutan di bawah undang-undang yang membatasi dari era Mubarak yang menghukum pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi palsu. Pihak keamanan terus menangkap dan memperlakukan tindak kekerasan kepada wartawan selama protes. Pihak keamanan menyerang, menangkap, dan menyiksa wartawan dan pengunjung rasa selama protes di luar Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari dan di luar Kementerian Pertahanan pada bulan Mei 2012 (Hrw.org, World Report 2013: Egypt, 2013).

Setelah pemilihan Presiden Mursi, pihak berwenang memerintahkan penutupan satu stasiun TV dan menyensor setidaknya tiga edisi surat kabar. Jaksa penuntut umum mengajukan tuduhan pencemaran nama baik terhadap setidaknya sembilan wartawan sehubungan dengan tulisan atau penyiaran mereka. Pada bulan November, menteri kehakiman menunjuk hakim investigasi untuk menginterogasi

sejumlah wartawan dan aktivis dengan tuduhan "menghina pengadilan." Pada tahun 2012, jaksa menginterogasi atau mendakwa setidaknya 15 orang dengan tuduhan kriminal yakni penghinaan terhadap agama. Pada bulan September, pengadilan di Assiout menghukum Bishoy Kamel hingga enam tahun penjara karena menghina Islam.

Polisi terus menggunakan penyiksaan di kantor polisi dan di tempat-tempat penangkapan, sebagian besar selama penyelidikan dalam kasus pidana biasa, tetapi juga dalam beberapa kasus politik, seperti penyiksaan terhadap para pengunjuk rasa yang ditangkap di Kairo pada bulan Agustus dan November tahun 2012. Penyiksaan polisi menyebabkan setidaknya 11 kematian dalam tahanan. Polisi juga terus menggunakan kekuatan yang berlebihan dan kadang mematikan, baik dalam demonstrasi kepolisian maupun dalam pemolisian reguler. Penyiksaan oleh militer juga terjadi. Pada bulan Mei tahun 2012, perwira militer menangkap setidaknya 350 demonstran, termasuk 16 wanita setelah protes di dekat Kementerian Pertahanan di Kairo berubah menjadi kekerasan. Mereka yang dibebaskan selama beberapa hari berikutnya memberikan laporan yang konsisten tentang penyiksaan dan pemukulan selama penangkapan dan dalam tahanan.

Sejak Desember 2011, polisi dan anggota tentara telah menangkap dan menahan lebih dari 300 anak yang berpartisipasi dalam protes. Anak-anak ditangkap dalam aksi unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2012, dan di depan kedutaan Amerika pada bulan September melaporkan pemukulan bahwa dalam beberapa kasus penyiksaan (Hrw.org, World Report 2013: Egypt, 2013). Meskipun banyak tahanan remaja, termasuk anak-anak yang tinggal dan bekerja di jalan, pihak berwenang secara konsisten menahan anak-anak dengan orang dewasa di kantor polisi dan membawa mereka ke hadapan jaksa biasa, dari pada merujuk mereka ke sistem peradilan anak seperti yang disyaratkan oleh hukum.

Insiden kekerasan sektarian antara Koptik dan Muslim berlanjut sepanjang tahun 2012 tanpa penuntutan baru atau

investigasi serius, dengan pengecualian investigasi terhadap kekerasan sektarian di Dahshour, Giza, di mana jaksa memerintahkan penahanan sembilan tersangka (Hrw.org, World Report 2013: Egypt, 2013). Pada tanggal 1 Februari, polisi dan pemimpin agama dan politik setempat memerintahkan pengusuran delapan keluarga Kristen setelah penduduk Muslim memecat rumah-rumah dan toko-toko penduduk Kristen di desa Sharbat, dekat Alexandria. Pengusuran itu dibatalkan dua minggu kemudian setelah para anggota parlemen mengunjungi daerah itu, tetapi pada akhir tahun, polisi masih gagal menuntut siapa pun atas kekerasan tersebut meskipun ada laporan polisi yang mengidentifikasi tersangka.

Pada 21 Mei 2012, di kota selatan Minya, sebuah pengadilan Keadaan Darurat Keamanan Negara, yang tidak memenuhi standar persidangan yang adil, menghukum 12 orang Kristen untuk hidup di penjara dan membebaskan 8 terdakwa Muslim yang telah dituduh sehubungan dengan bentrokan antara Muslim dan Kristen. pada April 2011. Bentrokan itu menyebabkan dua orang Muslim meninggal, beberapa terluka dari kedua belah pihak, dan puluhan toko dan rumah Kristen dibakar (Hrw.org, World Report 2013: Egypt, 2013).

Pada bulan Januari tahun 2013, polisi di Port Said menewaskan 46 orang selama tiga hari setelah orang-orang bersenjata menewaskan dua polisi selama demonstrasi di luar penjara (Hrw.org, 2014). Sebagai tanggapan, Presiden Mursi mengumumkan keadaan darurat satu bulan di kota-kota kanal Port Said, Suez, dan Ismailia. Pada bulan Januari dan Februari, polisi menembak mati sedikitnya 22 pengunjuk rasa anti Mursi lainnya di Kairo, Mansoura, dan Mahalla.

Bentrokan antara demonstran pro dan anti Ikhwanul Muslimin di minggu penggulingan Mursi antara 30 Juni dan 5 Juli menewaskan sedikitnya 54 orang di seluruh negeri. Pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan yang berlebihan dalam menangani protes pro Ikhwanul Muslimin yang melibatkan beberapa kekerasan di pihak demonstran.

Pada pagi hari tanggal 8 Juli, militer membubarkan pendukung Ikhwanul Muslimin yang duduk di luar markas Garda Republik, menewaskan 61 pemrotes yang menjawab dengan lemparan batu dan beberapa tembakan, yang menewaskan dua petugas keamanan.

Pada 27 Juli 2013, polisi terlibat bentrok dengan pawai para pendukung pro Ikhwanul Muslimin, menewaskan 95 pemrotes, banyak dari mereka dengan luka tembakan di kepala dan dada. Pada tanggal 14 Agustus, polisi secara paksa membubarkan dua orang pendukung Ikhwanul Muslimin di Rab'a al-Adawiya dan al-Nahda di Kairo, serta polisi juga menewaskan hingga 1.000 orang, menurut Perdana Menteri Hazem Beblawy (Hrw.org, 2014). Sejumlah kecil pengunjung rasa di Rab'a duduk menanggapi polisi dengan tembakan yang menewaskan tujuh polisi.

Pada bulan Januari dan Februari, polisi menangkap lebih dari 800 pemrotes di luar istana kepresidenan dan di tempat lain dan secara ilegal menahan ratusan, termasuk setidaknya 264 anak-anak, di kamp-kamp Pasukan Keamanan Pusat di mana mereka dikenakan puluhan penyiksaan, termasuk pelecehan seksual. Antara Januari dan Juni, setidaknya delapan orang tewas dalam tahanan akibat penyiksaan oleh polisi. Pada bulan Maret, Morsy memuji polisi sebagai "jantung revolusi."

Setelah militer menggulingkan Mursi pada Juli 2013, para pejabat militer menahan mantan presiden itu bersama dengan 10 orang pembantu seniornya di sebuah lokasi yang tidak diketahui selama berminggu-minggu. Pada tanggal 4 November, pihak berwenang akhirnya memindahkan Mursi ke pengadilan untuk pembukaan persidangannya. Hakim kemudian memerintahkan penahanannya di penjara biasa. Lima orang pembantu Mursi tetap ditahan tanpa komunikasi tanpa dasar hukum pada saat penulisan.

Dalam minggu-minggu setelah pembubaran aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Agustus, polisi menangkap mayoritas dari anggota tingkat tinggi dan banyak dari tingkat menengah

dari Ikhwanul Muslimin. Mereka juga menangkap ribuan demonstran, termasuk 1.400 orang yang ditahan setelah pembubaran aksi, 150 orang di antaranya adalah anak-anak. Jaksa memerintahkan penahanan pra peradilan mereka menunggu interogasi atas tuduhan menghasut atau berpartisipasi dalam kekerasan dan terus memperbarui penahanan mereka atas dasar permintaan dari badan-badan keamanan tetapi sedikit bukti independen (Hrw.org, World Report 2014: Egypt, 2014).

Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri mengakui pada Juli 2014 bahwa sejak pemecatan Morsy setahun sebelumnya, pemerintah telah menangkap 22.000 orang, sebagian besar atau bahkan tidak semua pendukung Ikhwanul Muslimin (Hrw.org, World Report 2015: Egypt, 2015). Menurut Pusat Mesir untuk Hak Ekonomi dan Sosial, lebih dari 41.000 orang ditangkap atau menghadapi tuntutan pidana antara Juli 2013 dan Mei 2014.

Hakim secara rutin memperbarui perintah penahanan, banyak dari mereka yang ditangkap selama berbulan-bulan tanpa dakwaan atau pengadilan dan menghukum banyak orang lain dalam persidangan massal tanpa membuat kesalahan individu untuk pelanggaran kriminal. Hingga Juli 2014, menurut data Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada komite pencari fakta kepresidenan, lebih dari 7.000 orang yang ditangkap akibat kejatuhan Mursi tetap dalam penahanan pra-persidangan.

Mereka yang ditahan termasuk sekitar 29.000 anggota Ikhwanul Muslimin, termasuk kepemimpinan tingkat tinggi dan menengah, menurut Ikhwanul Muslimin. Kampanye penangkapan diperluas pada tahun 2014 untuk memasukkan aktivis sekuler dan kiri atas tuduhan yang mencakup protes tanpa otorisasi, hasutan, premanisme, vandalisme, memblokir jalan, dan termasuk kelompok terlarang atau teroris.

Setidaknya 90 orang tewas di kantor polisi setempat dan direktorat keamanan di gubernuran Kairo dan Giza saja pada tahun 2014, menurut penyelidikan oleh surat kabar Mesir Al Watan, yang mengutip statistik dari Otoritas Medis Forensik

Kementerian Kehakiman. Angka itu mewakili peningkatan 38 persen dari tahun sebelumnya.

Seorang juru bicara pihak berwenang mengatakan kepada surat kabar itu bahwa penjara yang penuh sesak memaksa pihak berwenang menahan tahanan di kantor polisi dan tempat penahanan sementara lainnya yang tidak berventilasi baik atau jika tidak dilengkapi dengan baik. Para saksi mengatakan kepada *Human Rights Watch* bahwa polisi dan otoritas penjara sering gagal memberikan perawatan medis yang layak kepada tahanan (Hrw.org, World Report 2015: Egypt, 2015), yang menyebabkan kematian. Dalam beberapa kasus kematian dalam tahanan, pengacara dan kerabat menuduh bahwa pihak berwenang telah menyiksa korban.

Pada 1 Juli 2015, unit polisi khusus yang bertindak atas informasi dari Badan Keamanan Nasional Kementerian Dalam Negeri menyerbu sebuah apartemen di pinggiran Kairo dan menewaskan sembilan pejabat Ikhwanul Musliimin. Para kerabat mengatakan orang-orang itu tidak membawa senjata, dan *Human Rights Watch* menemukan bahwa kematian itu mungkin merupakan hukuman mati di luar hukum (Hrw.org, Egypt, 2016).

Petugas Keamanan Nasional bertanggung jawab atas lusinan orang yang hilang, yang sering mengincar aktivis politik. *Human Rights Watch* mendokumentasikan kasus lima penghilangan dan dua kemungkinan penghilangan antara April 2014 dan Juni 2015. Tiga dari kasus ini mengakibatkan kematian. Kelompok hak asasi manusia Mesir, *Freedom for the Brave*, mendokumentasikan 164 orang dinyatakan hilang antara April dan Juni (Hrw.org, Egypt, 2016).

Polisi secara teratur menggunakan penyiksaan dalam menyelidiki mereka. Sebuah laporan bulan Januari 2015 oleh sebuah firma hukum hak asasi manusia Mesir mengatakan bahwa para pengacaranya telah mewawancarai 465 orang yang diduga menjadi korban penyiksaan dan perlakuan buruk polisi antara Oktober 2013 dan Agustus 2014 dan mengajukan 163 pengaduan kepada jaksa, yang hanya tujuh yang mencapai pengadilan (Hrw.org, Egypt, 2016).



Petugas dari Badan Keamanan Nasional secara rutin menyiksa dan secara paksa menghilangkan tersangka dengan beberapa konsekuensi. Banyak tahanan yang mengalami pelanggaran ini dituduh bersimpati dengan atau keanggotaan dalam Ikhwanul Muslimin, yang pemerintah sebut sebagai kelompok teroris pada tahun 2013 tetapi tetap menjadi gerakan oposisi terbesar di negara itu. Antara Agustus 2015 dan Agustus 2016, Komisi Hak dan Kebebasan Mesir, sebuah kelompok independen, mendokumentasikan 912 korban penghilangan paksa, 52 di antaranya tidak muncul kembali ketika kelompok itu mengeluarkan laporannya (Hrw.org, 2017).

Petugas Keamanan Nasional secara rutin menyiksa tersangka selama penghilangan paksa ini. Antara Januari dan Oktober 2016, 433 tahanan mengklaim bahwa polisi atau petugas penjara menganiaya atau menyiksa mereka ketika mereka berada dalam tahanan, menurut hitungan oleh the *Nadeem Center for the Rehabilitation of Victims of Violence and Torture* berdasarkan laporan media, pernyataan pengacara, keluhan kriminal, dan sumber lain (Hrw.org, Egypt, 2017). Dalam satu kasus yang didokumentasikan oleh *Human Rights Watch*, petugas Keamanan Nasional di Alexandria secara paksa menghilang dan menyiksa 20 orang, termasuk delapan anak-anak, sehubungan dengan protes dan dugaan serangan pembakaran di garasi dan kendaraan polisi lalu lintas (Hrw.org, Egypt, 2017).

### **B.3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Didalam suatu negara terdapat unsur-unsur yang berperan dalam menjalankan negara tersebut. Pemerintah selaku pihak yang diberi kepercayaan untuk memimpin negara serta membawa negara menuju perkembangannya yang lebih baik. Pemerintah tidak dapat menjadi pihak tunggal dalam menjalankan negara. Terdapat elemen penting yang menjadi penyokong suatu negara agar menjadi lebih baik lagi. Elemen tersebut ialah masyarakat. Rendahnya partisipasi rakyat dapat menyulitkan pemerintah dalam memutuskan kebijakan apa

saja yang dirasa sesuai dengan situasi di suatu negara tertentu. Rendahnya keikutsertaan rakyat dapat menjadi pertanda bahwa pemerintah melakukan suatu kesalahan sehingga rakyat seakan enggan untuk turut andil bersama pemerintah dalam menjalankan suatu negara. Jika partisipasi masyarakat rendah, akan menimbulkan tanda tanya terhadap legitimasi dari pemerintahan yang berkuasa.

Perkembangan politik di Mesir khususnya pelengseran Presiden Muhammad Mursi telah mengangkat sejumlah perdebatan tentang keabsahan tindakan tentara Mesir karena melibatkan penggulingan presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Mesir. Perdebatan politik saat ini baik di dalam Mesir dan di seluruh dunia, berkisar baik di sekitar dukungan untuk tentara atau kecaman atas perannya dalam penggulingan Mursi. Mereka yang mendukung tindakan militer berpendapat bahwa Iran berfungsi sebagai pengingat tentang apa yang mungkin Mesir menjadi di bawah Ikhwanul Muslimin sedangkan mereka yang mengkritik dan menentang keterlibatan militer mengingatkan publik tentang bentrokan brutal di Aljazair yang dimulai pada tahun 1992 setelah kemenangan pemilu Islamis 'dan intervensi militer Aljazair untuk menggulingkan pemerintah terpilih (Jegatesen & Khelghat-Doost, 2013).

Dalam kedua kasus itu, pertama-tama penting untuk menentukan apakah apa yang terjadi di Mesir sama dengan kudeta atau apakah itu benar-benar fenomena yang sama sekali berbeda. Dengan asumsi bahwa itu memang kudeta, orang harus mempertanyakan apakah semua kudeta militer identik secara alami, atau jika mereka dapat dibedakan menurut motif dan atau hasil mereka? Contoh klasik dari sifat dinamis kudeta militer adalah Portugal pada tahun 1974, yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Bunga. Gerakan ini diprakarsai oleh *Armed Forces Movement* (MFA) dan dengan cepat memperoleh dukungan publik dan popularitas, yang akhirnya membawa runtuhnya Estado Novo dan kemudian, memulihkan demokrasi di Portugal.

Untuk menganalisa Mesir, mungkin pertama-tama perlu untuk menghindari asumsi-asumsi kosong. Sebagai contoh, asumsi bahwa semua kudeta militer merupakan perkembangan yang tidak menguntungkan atau bahwa semua rezim terpilih adalah baik. Secara bersamaan, ada juga kebutuhan untuk membedakan antara dua konsep terpilih dan demokratis. Ada sejumlah penguasa sepanjang sejarah yang dipilih oleh rakyat tetapi mempraktekkan sedikit nilai-nilai demokratis. Salah satu contoh adalah Adolf Hitler. Akibatnya, orang mungkin berpendapat bahwa hal yang sama berlaku untuk Mursi, yang mengapa pertama-tama perlu untuk memeriksa perilaku politik Mursi sampai penggulingannya.

Dari perspektif demokratis, cara yang tepat untuk menggantikan pemerintah adalah melalui proses pemilihan yang dijalankan secara demokratis. Dalam konteks ilmu politik, pihak yang kalah menerima kekalahannya dan dengan berbuat demikian, menjunjung tinggi kehendak rakyat dan menyerahkan kekuasaan.

Tidak satu pun dari janji-janji mendasar yang dibuat oleh Mursi dan Ikhwanul Musliminnya kepada masyarakat Mesir selama kampanye mereka digenapi. Awalnya, mereka mengklaim bahwa mereka tidak berniat berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan bahwa Ikhwanul Muslimin akan tetap menjadi partai politik di parlemen Mesir. Namun, janji ini dilanggar ketika partai mengambil alih kantor kepresidenan. Mereka juga berjanji kepada rakyat Mesir bahwa mereka akan membentuk kabinet rekonsiliasi nasional tetapi ini juga ternyata adalah janji kosong.

Menjelang beberapa bulan terakhir pemerintahan Mursi, sebagian besar penduduk Mesir tidak dapat membedakan sikap pemerintah Mursi dengan pemerintah pendahulunya Hosni Mubarak. Bagi banyak rakyat Mesir, pemikiran bahwa diperintah oleh seorang individu yang tidak berminat menjunjung nilai-nilai demokrasi dan malah tertarik hanya dengan menyita kekuatan legislatif, eksekutif dan yudisial selama tiga tahun ke depan, cukup dorongan bagi mereka

untuk turun ke jalan dan menuntut pengunduran dirinya (Jegatesen & Khelghat-Doost, 2013).

Penting untuk mengakui bahwa tanpa intervensi militer, Mesir berada dalam bahaya nyata jatuh ke dalam perang sipil antara kelompok pro dan anti Mursi. Tentara memegang posisi yang disukai di masyarakat Mesir dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa tentara memutuskan untuk menggulingkan Mursi. Sekitar 15 hingga 20 juta orang Mesir berdemonstrasi secara damai selama sehari-hari di jalanan meminta pengunduran diri Mursi, terus menerus mengabaikan keinginan masyarakat oleh pemerintahan Mursi hanya akan memprovokasi mereka lebih jauh dan menyebabkan kekerasan nasional. Namun, Mursi tidak berniat mengundurkan diri, atau bernegosiasi, sebagaimana dibuktikan oleh ketidakpeduliannya terhadap moratorium satu minggu yang ditetapkan oleh tentara untuk bernegosiasi.

Karena Mesir tidak memiliki lembaga sipil yang kuat (partai politik, LSM, serikat pekerja, dll.) Untuk menghadapi krisis semacam itu, tentara tampaknya menjadi satu-satunya otoritas yang mampu memulihkan ketertiban umum dan membatasi kekerasan yang meluas di seluruh negeri. Oleh karena itu, harus dijelaskan bahwa peran tentara harus hanya berfungsi untuk menjaga perdamaian dan bahwa tujuannya tidak boleh melebihi dari katalisator untuk perubahan demokratis (Jegatesen & Khelghat-Doost, 2013). Mungkin juga bermanfaat untuk dicatat bahwa skenario di Mesir bisa jauh lebih buruk seandainya tidak ada intervensi militer. Meskipun meningkatnya jumlah korban dalam bentrokan baru-baru ini antara tentara dan polisi dan para demonstran Ikhwanul Muslimin mengkhawatirkan, tentara tampaknya membuat kemajuan dalam menjaga bentrokan di bawah kontrol. Lebih dari 1.400 anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap selama bentrokan. Sejak pelengseran Presiden Mursi pada awal Juli, anggota dan pendukung Ikhwanul Muslimin menyerang gereja, kantor polisi, rumah dan bisnis orang Kristen, dan dalam prosesnya, mengubah sikap publik terhadap kelompok tersebut. Untuk saat ini, Mesir tampaknya

berada di ambang momentum penting lainnya dalam sejarah modernnya.

Dalam pemilihan parlemen pertama Mesir dalam empat tahun, untuk menggantikan legislatif yang dibubarkan pada tahun 2012 dan untuk menambah legitimasi kepada pemerintahan Presiden Abdul Fattah Al Sisi. Namun salah satu warga yang diwawancarai yakni Mona Ahmed berumur 20 tahun mengatakan ia melewatkan pemilu.

“Semua orang berbohong kepada semua orang,” katanya dengan lelah, menggemakan sikap apatis dan sinisme yang membantu mempertahankan otokrasi di sini selama beberapa decade (Fahim, 2015). Kaum muda lainnya di distrik Giza di Kairo yang lebih besar, yang diwawancarai pada malam pemungutan suara, merasakan hal yang sama. Yara Essam yang berumur 21 tahun mengatakan bahwa ia merasa "tercekik" oleh politik. Dia hanya sekali memilih, untuk Al Sisi dan mengatakan ia menyesalinya. “Dia tidak melakukan apa-apa,” katanya, mengutip perjuangan bisnis keluarganya. "Tidak ada yang berjalan dengan benar." Saad Eid yang berusia 20 tahun tahu dengan samar bahwa pemilihan diadakan, tetapi tidak dapat mengingat kapan. Dalam hal apapun, dia berkata, "Tidak ada kekuatan, kecuali tentara."

Pemilu parlementer, untuk memilih 568 anggota parlemen, akan diadakan dalam dua putaran pemungutan suara hingga November dan secara luas diharapkan untuk memberikan legislatif yang setia kepada Al Sisi, mantan jenderal yang memimpin pengambilalihan militer pemerintah pada musim panas 2013. Garis-garis di beberapa tempat pemungutan suara pada hari Minggu tampaknya pendek atau tidak ada, memaksa pemerintah untuk menyatakan libur setengah hari untuk pekerja negara pada hari Senin dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi. Namun, ketidakpuasan kaum muda tampaknya sulit untuk dibalikkan, semakin mengikis keuntungan dalam partisipasi politik yang mengikuti pemberontakan melawan Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011.

Pemerintah telah memuji pemungutan suara sebagai langkah penting dalam menyelesaikan transisi menuju demokrasi yang dikatakan dimulai dengan pengambilalihan. Namun kekuatan praktis dari Parlemen masih belum jelas. Yakni memiliki kewenangan yang signifikan, termasuk untuk mendakwa presiden, tetapi Al Sisi dan sekutunya telah menyarankan bahwa mereka akan berusaha untuk mengubah konstitusi untuk mengurangi kekuatan pembuat undang-undang, dan meningkatkan mereka dari Presiden.

Pengambilalihan Al Sisi menyingkirkan presiden pertama yang terpilih di Mesir, Muhammad Mursi, dan menekan gerakan Mursi, Ikhwanul Muslimin, yang merupakan kekuatan politik paling kuat di negara itu dan telah menjadi oposisi utama di bawah Mubarak. Sayap politik Ikhwanul Muslimin adalah pemungut suara terbesar dalam pemilihan parlemen terakhir, setelah pemberontakan yang menggulingkan Mubarak. Tetapi Ikhwanul Muslimin, yang telah dilarang, tidak bersaing dalam pemilihan saat ini, juga tidak ada kekuatan politik terorganisasi lainnya yang secara serius menentang Al Sisi.

Para kandidat, bagaimanapun termasuk ratusan mantan anggota Partai Demokratik Nasional yang dipimpin Mubarak, yang diharapkan mendapat manfaat dari jaringan patronase lokal yang tetap utuh selama tahun-tahun kekacauan politik sejak pemberontakan. Satu-satunya partai Islamis yang terorganisasi yang bersaing dalam pemilihan adalah Al Nour, partai Salafi yang pernah bersekutu dengan Ikhwanul namun mendukung penggulingan militer Tuan Morsi (Fahim, 2015).

Sekitar 28 persen pemilih Mesir memberikan suara dalam pemilihan parlemen yang didominasi oleh kandidat pro-pemerintah, komite pemilihan negara itu mengumumkan pada hari Jumat, menyusul tindakan keras terhadap kelompok oposisi Islamis utama. Hakim Ayman Abbas, ketua komite, mengatakan bahwa sekitar 15 juta dari total sekitar 53 juta orang telah memberikan suara dalam pemungutan suara yang berlangsung lebih dari enam minggu (Samaan, 2015).

Sementara Mubarak secara besar-besaran condong kepada aturan satu partai, Al Sisi menarik dukungan dari loyalis rezim di seluruh bagian dari partai yang lebih kecil, banyak dari mereka tergesa-gesa terbentuk pada waktunya untuk pemilihan ini. Parlemen baru akan berisi 568 anggota terpilih 448 yang dipilih secara perorangan dan 120 melalui daftar *winner take all lists* yang semuanya diserahkan kepada para loyalis. Al Sisi dapat menunjuk sebanyak 28 anggota parlemen lagi. Banyak kritikan yang mengatakan bahwa pemungutan suara yang berlangsung pada bulan Oktober dan November, dirusak oleh tindakan keras yang keras terhadap oposisi Islam dan politik lainnya.

Pemilihan ini, membentuk parlemen pertama Mesir dalam tiga setengah tahun, mengakhiri transisi yang dibuat oleh tentara setelah menggulingkan Mohamed Morsi, presiden Islam, pada musim panas 2013. Namun terlepas dari jebakan demokratis ini, para kritikus mengatakan rezim baru Mesir, yang dipimpin oleh Abdel Fattah el-Sisi, telah mengubah negara itu menjadi kediktatoran yang lebih kejam daripada para pendahulu, bersama mereka Hosni Mubarak, seorang diktator yang ditakuti.

Sebagian besar partai yang kini menduduki kursi parlemen didanai oleh para pengusaha yang terkait rezim. Banyak kandidat juga diperiksa oleh aparat keamanan yang ditakuti negara itu. *The Free Egyptians Party*, yang dimiliki oleh taipan bisnis dan media Naguib Sawiris, tampaknya telah mendapatkan mayoritas kursi partai dengan total 65 kandidat yang menang. "Untuk Cinta Mesir", aliansi elektoral yang loyal yang dipimpin oleh mantan perwira intelijen, akan memasuki parlemen dengan semua 120 kursi yang dialokasikan untuk daftar pemenang-mengambil-semua.

Rendahnya jumlah pemilih dalam pemilihan umum ini mencerminkan apatisme pemilih yang luas. Abbas, ketua panitia pemilu, mengatakan bahwa sekitar 16.000 pelanggaran pemilu telah terjadi, tetapi bersikeras pemilihan itu bebas, transparan, dan "akhir campur tangan negara dalam kehendak para pemilih (Samaan, 2015)." Pemilihan dimulai dua

setengah tahun setelah pasukan Sisi keamanan memimpin serangkaian pembantaian terhadap pendukung Ikhwanul Muslimin Morsi, yang memuncak pada kematian lebih dari 1.000 orang pada 14 Agustus 2013.

Pemilihan presiden Mesir pasca kudeta terhadap Mursi gagal memenuhi standar internasional demokrasi, dua tim pengamat asing mengatakan sehari setelah mantan perwira militer yang memimpin pengambilalihan militer musim panas lalu menang telak dengan lebih dari 95 persen suara. "Lingkungan politik Mesir yang represif membuat pemilihan presiden yang benar-benar demokratis tidak mungkin," Eric Bjornlund, Presiden *Democracy International*, sebuah organisasi pemantauan pemilu yang didanai oleh Amerika Serikat, mengatakan dalam sebuah pernyataan (Kirkpatrick, 2014). Dalam sebuah wawancara, dia menyebut konteks politik "sangat mengganggu."

Sebuah tim pengamat Uni Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa, meskipun ada jaminan dalam Konstitusi Mesir, penghormatan terhadap kebebasan mendasar dari pergaulan dan ekspresi "gagal memenuhi prinsip-prinsip konstitusional ini." Robert Goebbels, anggota Luksemburg dari Parlemen Eropa, meringkas pemungutan suara proses sebagai "bebas tetapi tidak selalu sangat adil," mencatat keuntungan luar biasa pemenang dalam sumber keuangan dan perhatian media berita.

Pemenangnya, Abdul Fattah Al Sisi, mantan marshal tentara lapangan, secara universal dianggap sebagai kandidat negara, pendirian politik dan elit bisnis, dan kemenangannya telah begitu luas diharapkan bahwa itu hampir menjadi formalitas. Pejabat pemilihan mengatakan bahwa satu-satunya lawan Sisi, Hamdeen Sabahi, telah memenangkan kurang dari 3 persen suara. Dia selesai pada dasarnya terkait dengan jumlah surat suara yang telah dirusak untuk memprotes kritik yang disebut iklim tidak demokratis dan pilihan terbatas.

Para pendukung Sisi menghitung pada pemilihan untuk melegitimasi kepemimpinan Al Sisi setelah pemecatan militer musim panas lalu dari Presiden Mohamed Morsi dari



Ikhwanul Muslimin, dianggap sebagai pemimpin pertama Mesir yang cukup terpilih. Para pejabat mengatakan bahwa sekitar 47 persen dari sekitar 54 juta pemilih yang memenuhi syarat telah memberikan 23.9 juta suara. Sebagai perbandingan, Mursi menerima sekitar 13,2 juta suara pada tahun 2012, dalam perlombaan yang dekat dan kompetitif terhadap mantan jenderal lainnya, Ahmad Shafiq (Kirkpatrick, 2014).

Ketiadaan pemilih begitu mencolok pada dua hari pertama pemungutan suara yang dijadwalkan, sehingga para pejabat pemilu mengambil langkah luar biasa untuk menambah hari ketiga pada menit terakhir, untuk memperkuat jumlah pemilih. Kedua tim pengamat asing menyalahkan penambahan menit terakhir pada hari ketiga sebagai ketidakberaturan yang tidak perlu yang menimbulkan keraguan tentang kredibilitas proses dan independensi otoritas pemilu. Bjornlund dari Democracy International mengatakan pengamatnya tidak melihat hambatan untuk memilih pada dua hari pertama yang mungkin membenarkan hari ketiga, dan delegasi Uni Eropa mengatakan hari ketiga "menyebabkan ketidakpastian yang tidak perlu dalam proses pemilihan (Kirkpatrick, 2014)."

Sekarang, Ikhwanul Muslimin, yang mendominasi pemilihan Mesir melalui sayap politiknya selama tiga tahun sebelumnya, telah dilarang dan ditindas. Pada malam sebelum hari pemungutan suara tambahan, kampanye Sabahi menarik pengawasnya dari tempat pemungutan suara, mengeluh bahwa pasukan keamanan di sana tidak termasuk, menyerang dan menangkap mereka.

Sebagai hasilnya, Bjornlund mengatakan, jumlah pemilih atau suara tidak dapat dikonfirmasi oleh misi pengamat yang relatif kecil. "Kami tidak tahu berapa jumlah pemilih untuk pemilihan ini," katanya. 86 tim pemantauan *Democracy International* tidak melihat jumlah pemilih yang besar, katanya, tetapi kelompok "tidak memiliki sarana untuk mengevaluasinya."

Setidaknya satu hakim di komisi pemilu secara terbuka mempertanyakan beberapa prinsip dasar demokrasi. Menjelang pemilihan parlemen pertama Mesir setelah penggulingan Presiden Hosni Mubarak pada 2011, seorang hakim yaitu Nabil Salib berpendapat di kolom surat kabar bahwa pemilihan demokratis tidak cocok untuk Mesir karena begitu banyak orang Mesir miskin dan tidak berpendidikan.

"Saya berdebat untuk membatalkan pemilihan" sampai "buta huruf menghilang, kondisi kehidupan warga dijamin setidaknya pada standar minimum, keinginan mereka dibebaskan dan budaya mereka yang maju," tulisnya, merekomendasikan bahwa komite hakim dan intelektual memilih para pemimpin. "Membatalkan pemilihan adalah awal dari jalan nyata untuk mereformasi dan langkah pertama yang benar di jalur seribu mil" (Kirkpatrick, 2014).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adanya kebebasan menentukan nasib sendiri, kebebasan mengeluarkan segala pendapat, tidak adanya larangan untuk memilih pilihannya sendiri, dan ketiadaan paksaan terhadap keyakinan dalam beragama menjadikan demokrasi seperti primadona bagi negara-negara di dunia terutama bagi negara-negara yang masih berstatus sebagai negara berkembang. Banyak negara yang dipimpin oleh rezim otoriter berupaya menjadi negara yang lebih demokratis. Rezim-rezim otoriter yang telah memerintah suatu negara cukup lama, didesak kemudian ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri yang menginginkan agar demokrasi di negara nya ditegakkan. Negara Mesir yang pernah dipimpin oleh seorang presiden bernama Hosni Mubarak yang telah menjabat dari tahun 1981 sampai tahun 2011 diturunkan secara paksa oleh rakyatnya sendiri melalui jalur demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama 18 hari. Revolusi yang terjadi di Mesir tersebut merupakan bagian dari serangkaian revolusi berbentuk demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Timur Tengah yang dimulai pada tahun 2010 hingga sekarang. Gelombang demokrasi di Timur Tengah dikenal dengan nama *Arab Spring*.

*Arab Spring* merupakan suatu gelombang revolusi sipil yang terjadi di Kawasan Timur Tengah. Gelombang revolusi ini terjadi sebagai akibat dari tuntutan rakyat untuk menurunkan suatu rezim yang tidak memiliki keberpihakan kepada rakyatnya sendiri. Karena adanya suatu revolusi disebabkan adanya ketidakpuasan rakyat kepada pemimpinnya yang tidak dapat ditolerir lagi. Penguasa dianggap telah melakukan kejahatan kepada rakyatnya dengan tidak mengindahkan prinsip dari demokrasi.

Berawal dari keberhasilan rakyat Tunisia untuk menurunkan presidennya, telah memberikan inspirasi bagi

negara-negara disekitar Tunisia untuk melakukan hal yang sama. Sebab kondisi sosial yang memiliki persamaan diantara negara-negara di Timur Tengah, revolusi yang terjadi di Tunisia dapat dengan mudah diterima oleh rakyat di negara sekitarnya. Kebanyakan negara di Timur Tengah dipimpin oleh pemerintah yang memimpin cukup lama serta beberapa pemimpin negara di Kawasan Timur Tengah meneruskan jabatannya kepada keturunannya. Setelah Zine El Abidine Ben Ali yang diturunkan oleh rakyatnya sendiri. Rakyat Mesir mulai melakukan upaya serupa untuk menurunkan presidennya sendiri yakni Hosni Mubarak yang telah memimpin selama 30 tahun. Revolusi di Mesir dimulai pada 25 Januari 2011 dan berakhir pada 11 Februari 2011 seiring dengan pengumuman pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak. Berita itu disambut dengan ledakan sukacita dan perayaan besar oleh ribuan orang di Lapangan Tahrir Kairo. Sebelum terselenggaranya prosesi pemilu tampuk pemerintahan dipegang oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata yang dipimpin oleh Muhammad Hussein Tantawi yang merupakan kepala negara secara *de facto* dari negara Mesir.

Namun, pada kelanjutannya dalam rentang tahun 2011 hingga 2016 demokrasi yang diimpikan oleh masyarakat Mesir tidak benar-benar terwujud. Adanya dominasi dari kelompok Ikhwanul Muslimin didalam pemerintahan. Presiden Mursi dikritik oleh sejumlah pihak karena menempatkan beberapa anggota Ikhwanul Muslimin di bebrbagai sektor pemerintahan Mesir. Keputusan yang diambil mesikipun merupakan hak prerogatif Mursi sebagai seorang presiden, menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan. Dalam menyongsong demokrasi didalam suatu negara, selayaknya tidak mengistimewakan golongan tertentu untuk dijadikan anak emas bagi suatu pemerintahan.

Masuknya militer didalam kehidupan sosial di masyarakat. Dimana militer yang seharusnya memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan serta kedaulatan negara,

justru turut berkecimpung didalam dunia politik pemerintahan. Kelompok militer tentu memiliki segala modal atau bantuan yang diperlukan untuk meraih kekuasaan di suatu negara. Dengan terjunnya militer didalam suatu pemerintahan telah menjadikan kehidupan berdemokrasi menjadi tidak sehat. Sebab pemerintahan yang demokrasi didasarkan pada persetujuan dari rakyat, yang pada selanjutnya kekuasaan dari pemerintahan tersebut dipergunakan untuk kepentingan rakyat pula.

Keluarnya Dekrit Presiden pada 22 November 2011, telah menimbulkan penolakan dari masyarakat Mesir karena dengan adanya dekrit tersebut maka terdapat upaya dari seorang presiden dalam melenggangkan kekuasaannya. Tentunya tujuan dari adanya revolusi yang menuntut rezim otoritarian untuk turun adalah bukan untuk menciptakan rezim otoritarian yang baru.

Pada 30 Juni 2013 bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Muhammad Mursi, warga Mesir turun ke jalan untuk memuntut agar Mursi mengundurkan diri sebagai Presiden. Demonstrasi ini pada selanjutnya memantik terjadinya bentrokan antara dua kubu yakni kubu pendukung Mursi dan kubu oposisi. Pada 1 Juli pihak militer mengeluarkan ultimatum kepada Mursi untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemberontakan dari masyarakat sipil yang mana dalam tenggat waktu 48 jam pihak Militer akan turun tangan apabila Mursi tidak memenuhi tuntutan dari rakyat. Pada 3 Juli 2013 pihak Militer melalui Jendral Abdul Fattah Al Sisi mengeluarkan pernyataan resmi bahwa telah mengambil alih kursi pemerintahan Mesir. Keesokan harinya Adly Mansour selaku Ketua Mahkamah konstitusi Mesir ditunjuk sebagai presiden sementara hingga terselenggaranya pemilu.

Kegagalan demokratisasi pasca tumbangnya rezim Mubarak hingga pada tahun 2016 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, Pemerintah tidak memiliki kemampuan

dalam hal melakukan perubahan untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi masyarakat. Seperti kebebasan yang seharusnya tidak dapat dapat dinikmati oleh kebanyakan masyarakat Mesir, kegaduhan politik yang terjadi, dan perekonomian yang tidak kunjung membaik. Dalam proses menuju demokrasi, pemerintahan yang melakukan transisi demokrasi perlu melakukan suatu perubahan pada aspek-aspek mendasar pada bidang sosial, politik, ekonomi.

Apabila pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan tersebut, maka proses demokratisasi akan menemukan kesulitan. Tujuan diadakan revolusi sosial yang bernama *arab spring* adalah untuk menurunkan rezim yang berkuasa pada saat itu. Dengan begitu akan tercipta suatu perubahan yang lebih baik untuk masyarakat. Kegagalan pemerintah membentuk suatu aturan dalam upaya mewujudkan situasi yang kondusif bagi masyarakat. Kerap terjadinya aksi unjuk rasa yang tidak jarang berujung pada bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. K

Kedua, Terdapat warisan dari rezim otoritarian sehingga demokrasi yang berkembang tidak dapat membudaya dalam praktek-praktek politik karena tidak adanya elemen masyarakat dalam proses konsolidasi. Ketiadaan elemen masyarakat dalam proses konsolidasi sehingga demokrasi yang berkembang tidak dapat membudaya dalam praktek-praktek politik. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan menimbulkan pertanyaan akan legitimasi dari pemerintah yang berkuasa.

Sepeninggal dari pemerintahan yang otoriter, rezim tersebut akan mewariskan sejumlah kasus-kasus seperti pelanggaran HAM serta praktek KKN yang dilakukannya ketika menjadi penguasa. Ketika pemerintahan pasca rezim otoritarian tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat pemerintahan rezim yang otoriter atau malah memperparah permasalahan yang ada, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang memimpin akan

menurun. Praktek KKN yang mengakar didalam pemerintahan merupakan suatu ancaman bagi keberlangsungan negara. Lembaga yang seharusnya bersikap profesional yang berkerja untuk kepentingan masyarakat luas, justru menggnukan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sejatinya masyarkat merupakan sebuah aset yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Namun sikap represif pemerintah terhadap rakyatnya sendiri telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.